

PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN TATA KELOLA HUTAN TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK

INSTITUTIONAL DEVELOPMENT OF FOREST GOVERNANCE NATIONAL PARK OF HALIMUN SALAK MOUNTAIN

Neng Virly Apriliyani¹, Rita Rahmawati², Denny Hernawan³

¹ Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Djuanda, Jl.Tol Ciawi No 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770

² Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Djuanda, Jl.Tol Ciawi No 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770

³ Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Djuanda, Jl.Tol Ciawi No 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770

(Diterima oleh Dewan Redaksi: 01-08-2015)

(Dipublikasikan oleh Dewan Redaksi: 01-10-2015)

ABSTRACT

This study aims to investigate the implementation of institutional development TNGHS forest governance, aspects of the advantages and disadvantages, and institutional design recommendations TNGHS Hall.

This study uses research is descriptive research method of analysis. This method is defined as a troubleshooting procedure investigated by describing the state of the subject or object of research that is going on at the present time based on the facts as they should be seen in the field

After analysis against each indicator of variable institutional development that the average score of respondents' assessment results is 3.84, which means being on the classification of Good assessment, thus assessment of the institutional development of the national park forest governance Halimun Salak mountain has done well.

Although the classification assessment of all dimensions of institutional development are in the good category, but according to the results of interviews with respondents there are several dimensions that need to be improved further in the development of institutional governance national park of halimun salak mountain bark like dimensions of resources, programs, link normative and link dispersed.

Keywords: Institutional Development

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengembangan kelembagaan tata kelola hutan TNGHS, aspek-aspek yang menjadi kekurangan dan kelebihan, dan rekomendasi desain kelembagaan Balai TNGHS.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu metode penelitian deskriptif analisis. Metode ini diartikan sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian yang terjadi pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terlihat dilapangan sebagaimana mestinya

Setelah dilakukan analisis terhadap setiap indikator dari variable pengembangan kelembagaan bahwa skor rata-rata hasil penilaian responden adalah 3,84 yang artinya berada pada klasifikasi penilaian Baik, dengan demikian penilaian terhadap pengembangan

kelembagaan tata kelola hutan taman nasional gunung halimun salak sudah dilakukan dengan baik.

Meskipun klasifikasi penilaian terhadap semua dimensi pengembangan kelembagaan berada pada kategori baik, akan tetapi menurut hasil wawancara dengan responden masih ada beberapa dimensi yang harus ditingkatkan lagi dalam pengembangan kelembagaan tata kelola hutan taman nasional gunung halimun salak seperti dimensi sumber-sumber daya, program, kaitan normatif dan kaitan tersebar.

Kata Kunci: Pengembangan Kelembagaan

Neng Virly Apriliyani, 2015. Pengembangan Kelembagaan Tata Kelola Hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki luas hutan terbesar di dunia. Menurut Departemen Kehutanan (2011) luas hutan Indonesia mencapai 99,6 juta hektar atau 53,3 persen dari luas wilayah Indonesia (statistik Kehutanan Indonesia Kemenhut, 2011).

Pada saat ini Indonesia menjadi pusat perhatian dunia, karena kerusakan sumber daya hutan (deforestasi) benar-benar parah, laju deforestasi hutan Indonesia menurut Forest Watch Indonesia (2002) mencatat kerusakan hutan di Indonesia mencapai 2 juta hektar pertahun. Setelah pemerintah melakukan berbagai upaya perbaikan dalam rangka memecahkan masalah tersebut, laju deforestasi tidak separah tahun 2002.

Menurut UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan upaya pelestarian hutan Indonesia dilakukan dengan cara penetapan beberapa kawasan hutan sebagai Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Taman Nasional.

Dalam prakteknya, pengelolaan hutan di Indonesia tidaklah mudah. Kondisi tata kelola pengelolaan hutan telah menjadi tantangan tersendiri dan tidak dapat dipungkiri telah menjadi sorotan berbagai pihak mulai dari tingkat lokal, nasional, hingga global. Permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan pada saat ini adalah Persoalan tata batas kawasan hutan, baik batas luar maupun batas fungsi, implementasi unit pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), tingginya gangguan keamanan hutan baik terhadap kawasan maupun hasil-hasilnya seperti pencurian kayu, penebangan pohon, termasuk ancaman kebakaran hutan dan lahan merupakan persoalan besar (lihat Rita Rahmawati, 2004).

Di dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1999 tentang kehutanan, pengelolaan hutan mencakup : 1. Tata hutan 2. Penyusunan rencana pengelolaan hutan 3. Pemanfaatan hutan 4. Penggunaan

kawasan hutan 5. Perlindungan dan konservasi.

Dalam rangka penyelamatan hutan Indonesia, pemerintah melakukan agenda pembangunan hutan berkelanjutan yaitu dilakukan melalui pengembangan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Salah satu penerapan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya adalah dengan pembentukan Taman Nasional.

Salah satu contoh kasus Taman Nasional adalah Taman Nasional Gunung Halimun. Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun merupakan salah satu Taman Nasional yang berada di Indonesia.

Dengan berpijak pada Undang-Undang Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Nomor 5 tahun 1990, melalui surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 282/Kpts-II/1992 pemerintah menetapkan kawasan ekosistem Gunung Halimun dan sekitarnya sebagai kawasan konservasi dengan nama Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH) yang mempunyai luas kawasan 40.000 hektar, tersebar di tiga kabupaten, yaitu kabupaten Lebak provinsi Banten, kabupaten Bogor dan kabupaten Sukabumi provinsi Jawa Barat (Budi Santoso, 2007).

Sementara itu, gunung salak merupakan daerah koridor yang langsung berhubungan dengan wilayah Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH), sehingga keanekaragaman hayati lainnya yang ada di Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH) juga terdapat di gunung salak. Dengan keadaan tersebut, pemerintah Melalui keputusan Menteri Kehutanan Nomor 175/Kpts-II/2003 pada tanggal 10 juni 2003 menerangkan penunjukan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH) dan perubahan kawasan hutan lindung, hutan produksi tetap, dan hutan produksi terbatas pada kelompok Hutan Gunung Halimun dan kelompok Hutan Gunung Salak yang dikelola oleh perum perhutani, telah berubah menjadi Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS) dengan luas

kawasan 113.357 hektar. Dengan demikian ada penambahan luas wilayah sebesar 73.357 hektar yang semula hanya 40.000 hektar (Budi Santoso, 2007).

Dasar pertimbangan yang diambil oleh pemerintah dengan dikeluarkannya surat keputusan tersebut adalah kawasan hutan yang berada di kawasan gunung halimun dan gunung salak merupakan kesatuan hamparan hutan dataran rendah dan pegunungan yang mempunyai keanekaragaman sumber daya alam hayati yang tinggi, sumber mata air bagi kepentingan kehidupan masyarakat sekitar yang perlu dilindungi dan dilestarikan (lihat Budi Santoso, 2007).

Dengan perluasan kawasan dari 40.000 hektar menjadi 113.357 hektar dan pengambilalihan pengelolaan dari perum perhutani ke Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak dengan keterbatasan perlindungan dan pengamanan hutan terus menghadapi tantangan, yaitu berupa aktifitas illegal seperti penebangan pohon, pencurian kayu di wilayah konservasi serta semakin berkembangnya jumlah penduduk di dalam dan di sekitar kawasan yang bergantung terhadap kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (M. Taufik Wahab, 2011).

Saat ini, Balai TNGHS masih menghadapi masalah-masalah penghambat. Berikut masalah-masalah penghambat yang termuat dalam laporan tahunan BTNGHS 2014 dan berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai BTNGHS:

a. Sumber-sumberdaya

Sumber-sumber daya yang ada di Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak seperti pendanaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana masih terbatas. Pendanaan untuk BTNGHS setiap tahunnya menurun, alokasi anggaran pada tahun anggaran 2014 mengalami pengurangan anggaran yang tadinya Rp. 12.621.899.000,- menjadi Rp. 10.867.900.000,- secara keseluruhan pengurangan anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.753.999.000,-. Pengurangan anggaran tersebut merupakan kebijakan

pada level pemerintah pusat. Selanjutnya untuk SDM yang ada di BTNGHS, dari segi kuantitas dan kualitas personil yang ada hingga saat ini belum mencukupi kepentingan pengelolaan taman nasional, bila dibandingkan dengan luas kawasan dan permasalahan pengelolaan yang dihadapi. Apabila dilihat dari jumlah resort pengelolaan taman nasional (17 resort) jumlah pegawai pada masing-masing resort hanya 2 sampai 3 orang sementara untuk mengelola kawasan secara optimal dibutuhkan minimal 5 sampai 6 orang pegawai. Sedangkan untuk sarana dan prasarana (sarpras) untuk pengelolaan dan pemanfaatan taman nasional saat ini masih belum memenuhi kebutuhan. Secara kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana masih belum memadai secara optimal, beberapa sarana dan prasarana sudah tidak layak pakai sehingga perlu perbaikan dan atau pergantian seperti alat transportasi, alat komunikasi, dan alat pemadam kebakaran hutan (BTNGHS,2015).

b. Program

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat bagi kelompok atau masyarakat dan kawasan TNGHS dalam program MKK (Model Kampung Konservasi di beberapa kampung kurang berjalan dengan baik. Seperti MKK di desa Sirnaresmi sudah tidak berjalan, berdasarkan hasil wawancara program MKK di desa sirnaresmi sulit dilakukan karena mereka masyarakat kasepuhan yang memang memiliki aturan adat tersendiri. Dan kegiatan di kelompok kampung konservasi Cililin juga kurang berhasil, secara kelembagaan dan aktivitas kelompok sudah tidak berjalan disebabkan oleh perpecahan kelompok dan sebagian besar anggota kelompok mencari pekerjaan lain seperti menjadi penambang liar (BTNGHS,2015).

c. Kaitan Tersebar

Hubungan antara masyarakat terutama masyarakat adat dengan BTNGHS kurang baik, hal tersebut dikarenakan sampai saat

ini masyarakat tidak setuju dengan adanya alih fungsi hutan menjadi hutan konservasi, berdasarkan hasil wawancara semenjak alih fungsi tersebut ruang gerak masyarakat untuk memanfaatkan hasil hutan dan menggarap hutan tidak bebas seperti dulu yang masih dikelola perum perhutani. Mengambil pohon untuk dijadikan kayu bakar saja sekarang sudah tidak boleh, sedangkan ketergantungan masyarakat terhadap hutan masih sangat tinggi.

MATERI DAN METODE

Menurut **Sugiyono (2013:1)** “metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu metode penelitian deskriptif analisis. Metode ini diartikan sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian yang terjadi pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terlihat dilapangan sebagaimana mestinya (**Hadari Nawawi, 2001:63**).

Populasi menurut Sugiyono (2013 90:91) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah para pegawai Balai TNGHS yang berada di wilayah administrative sukabumi dan seluruh masyarakat di desa Sirnaresmi dan desa Cipeteuy kabupaten Sukabumi. Untuk menentukan sampel para Pegawai Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak digunakan teknik sampling *Disproportionate Stratified Random Sampling*. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel, bila populasi

berstrata tetapi kurang proporsional (Sugiyono, 2013:93).

Dalam penelitian ini untuk mengukur besarnya sampel menggunakan Rumus Yamane dalam **Romli (2006:63)** dengan tingkat margin error 10% dan tingkat kepercayaan 90 %.

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

$$n = \frac{45}{45(0,1)^2 + 1}$$

$$= \frac{45}{1,45}$$

= 31,03 dibulatkan menjadi 32 orang

Keterangan:

n = Ukuran Sampel

N = Jumlah Populasi

d = Presisi (tingkat kesalahan yaitu 10% atau 0,1)

Dari hasil perhitungan diatas, selanjutnya untuk menentukan jumlah sampel untuk setiap strata, peneliti menggunakan ketentuan rumusan yang dikemukakan oleh Harun Al-Rasyid (1989:19) yaitu:

$$n_i = \frac{N_i}{N} \times n$$

Keterangan :

n_i = Ukuran sampel perstrata

N = Populasi perstrata

n = Ukuran sampel

N_i = Populasi

Dari rumus tersebut diperoleh sampel pegawai sebagai berikut:

Tabel 3.2
Sampel Pegawai

N o	Jabatan / Jenis Pekerjaan	Jumla h Popul asi	Jum lah Sa mp el
1.	Urusan Umum	6	5
2.	Urusan Kepegawaian	3	3
3.	Urusan Keuangan	5	4
4.	Urusan Program Anggaran Evaluasi dan	2	2

	Pelaporan		
5.	Urusan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat	3	3
6.	Urusan Pemanfaatan Jasa Lingkungan	3	3
7.	Urusan Konservasi Kawasan	5	4
8.	Urusan Konservasi Keanekaragaman Hayati	2	3
9.	Urusan Perlindungan dan Pengendalian Kebakaran Hutan	7	5
10.	Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Sukabumi	9	6
Jumlah		45	38

Untuk menambah data dan informasi dilakukan wawancara terhadap masyarakat. Adapun masyarakat yang menjadi informan berjumlah 50 orang yang dibedakan berdasarkan status dalam kemasyarakatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3
Jumlah Informan Masyarakat

No	Instansi	Desa Sirnaresmi	Desa Cipeuteuy
1	Perangkat Desa	5	5
2	Pengurus Kelembagaan	5	5

	Masyarakat Lokal		
3	Tokoh Masyarakat	5	5
4	Kepala Keluarga	5	5
5	Ibu Rumah tangga	5	5
Jumlah		25	25

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data-data adalah (a) Studi Kepustakaan (buku, dokumen, dan berbagai macam literatur), (b) Studi Lapangan dengan cara (1) Observasi, (2) Wawancara (Pegawai Balai TNGHS dan Masyarakat Desa Sirnaresmi dan Desa Cipeuteuy), (3) Kuesioner (31 orang Pegawai Balai TNGHS, 25 Masyarakat Adat Kasepuhan Sinarresmi, dan 25 Masyarakat Non Adat Desa Cipeuteuy (Kp.Sukagalih).

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Yang dimaksud dengan analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, dipahami serta diinterpretasikan (Sugiono, 2007 : 169).

Analisis data yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan menggunakan tabulasi yaitu tabel frekuensi. Setelah data tersebut terkumpul, lalu diklasifikasikan menurut jenisnya, yaitu :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan kuesioner yang dibagikan kepada responden.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Balai Taman Nasional Gunung Halim Salak, Desa Cipeuteuy, dan Desa Sirnaresmi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan perhitungan Weight Means Score (WMS) yaitu untuk setiap item pertanyaan. Adapun rumus WMS adalah sebagai berikut :

$$M = \frac{\sum f(x)}{n}$$

Keterangan :

- M = Kriteria penafsiran
- f = Frekuensi jawaban responden
- x = Pembobotan
- n = Jumlah sampel

Untuk menentukan kriteria penafsiran dilakukan dengan cara menghitung interval nilai, yaitu dengan cara sebagai berikut :

Tabel 3.6
Kriteria Penilaian Terhadap
Angka Penafsiran

No.	Angka Penafsiran	Kriteria Penilaian
1.	4,21 – 5,00	Sangat Baik
2.	3,41 – 4,20	Baik
3.	2,61 – 3,40	Cukup Baik
4.	1,81 – 2,61	Kurang Baik
5.	1,00 – 1,80	Tidak Baik

Sumber : Sugiyono (2013:74)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Lokus Penelitian

Tahun	Perubahan Status Kawasan
1935 – 1961 :	Cagar Alam di bawah pengelolaan Pemerintah Belanda dan Republik Indonesia/Djawatan Kehutanan Jawa Barat
1961 – 1978 :	Cagar Alam di bawah pengelolaan Perum Perhutani Jawa Barat
1979 – 1990 :	Cagar Alam di bawah pengelolaan Balai konservasi Sumberdaya alam III, yaitu Sub Balai Konservasi Sumberdaya Alam Jawa Barat I
1990 – 1992 :	Cagar Alam dikelola oleh Taman Nasional

Tahun	Perubahan Status Kawasan
	Gunung Gede Pangrango;
1992 – 1997 :	Taman Nasional dibawah pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango
1997 – 2003 :	Taman Nasional dibawah pengelolaan Balai Taman Nasional Gunung Halimun setingkat Eselon III dengan luas 40.000 Ha
2003 :	Penunjukkan kawasan menjadi Taman Nasional Gunung Halimun Salak seluas 113.357 Ha (memasukkan eks hutan produksi/lindung)

Pengelolaan Kawasan TNGHS berada di bawah tanggung jawab Unit Pelaksana Teknis Balai TNGHS, yang terbagi ke dalam tiga seksi wilayah dengan 17 Resort.

Sosial, Budaya dan Ekonomi Masyarakat

Masyarakat lokal yang ada umumnya adalah suku Sunda, yang terbagi ke dalam kelompok masyarakat kasepuhan dan bukan kasepuhan. Untuk masyarakat kasepuhan, secara historis penyebarannya terpusat di Kampung Urug, Citorek, Bayah, Ciptamulya, Cicarucub, Cisungsang, Sirnaresmi, Ciptagelar dan Csitu. Masyarakat kasepuhan masih memiliki susunan organisasi secara adat yang terpisah dari struktur organisasi pemerintahan formal (desa).

Masyarakat setempat memanfaatkan hutan dan lahan sekitarnya dalam berbagai cara, yaitu seperti huma/ladang (*swidden cultivation*), sawah (*rice growing*), kebun (*garden*), kebuntalun (*mixed garden*) dan talon (*mixed forest*). Masyarakat memiliki kearifan tradisional yang sifatnya turun temurun dalam pemanfaatan dan

konservasi hutan, melalui pembagian wilayah berhutan berdasarkan intensitas pemanfaatan dan tingkat perlindungannya yaitu adanya 'leuweung titipan' (*protected forest*), 'leuweung tutupan' (*conservation forest*), atau 'leuweung sampalan' (*opened forest*).

Kondisi Kelembagaan

Tugas Pokok Balai TNGHS

Balai TNGHS mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan TNGHS sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi dan berdasarkan perundangan yang berlaku. Berdasarkan peraturan Menteri No P.03/Menhut-II/2007 tanggal 1 Februari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Unit Teknis Taman Nasional, Balai TNGHS merupakan organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan konservasi Alam.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, pengelolaan TNGHS mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Melakukan penyusunan program pengembangan TNGHS, 2. Melakukan pemangkuan kawasan, perlindungan, pengawetan dan pelestarian flora fauna dan ekosistemnya, 3. Melaksanakan pemanfaatan dan promosi serta memberikan informasi mengenai TNGHS, 4. Melakukan urusan tata usaha BTNGHS, 2014).

Balai TNGHS selaku pengelola TNGHS memiliki kegiatan-kegiatan pengelolaan yang dapat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu manajemen kawasan, manajemen sumberdaya alam, dan manajemen kelembagaan. Secara umum kegiatan dalam tiga dimensi manajemen kelembagaan tersebut adalah:

a. Manajemen Kawasan, adalah strategi pengelolaan taman nasional yang meliputi pemantapan kawasan, penataan kawasan, dan pengamanan kawasan. Manajemen kawasan merupakan prasyarat keharusan dalam pengelolaan taman nasional. Pada dimensi ini meliputi pengukuhan kawasan, penataan kawasan berdasarkan fungsinya atau zonasi, dan pengamanan kawasan.

b. Manajemen Sumber Daya Alam, adalah strategi pengelolaan taman nasional yang merupakan inti kegiatan pengelolaan taman nasional yang meliputi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati dan pemanfaatan sumberdaya alam.

c. Manajemen Kelembagaan, merupakan prasyarat kecukupan agar pengelolaan taman nasional dapat berlangsung dan berkembang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pada kelompok ini setidaknya harus terdapat tiga pokok hal, yaitu penataan organisasi, sumberdaya manusia dan keuangan.

Balai TNGHS termasuk taman nasional tipe B yaitu terdiri dari 1 orang kepala balai setingkat IIIa ditambah 1 orang kepala sub bagian tata usaha setingkat eselon Iva serta 3 orang kepala seksi wilayahsetingkat eselon Iva, serta kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari polisi kehutanan, pengendali ekosistem hutan, dan penyuluh kehutanan. Adapun tugas dan fungsi jabatan pegawai BTNGHS saat ini yang mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.335/Menhut-II/2004 tentang Nama Jabatan dan Uraian Jabatan Struktural dan non-Struktural Unit Pelaksana Teknis di lingkungan department Kehutanan yang dikeluarkan pada tanggal 28 September 2004.

Analisa Deskriptif Pengembangan Kelembagaan Tata Kelola Hutan TNGHS

Dalam bagian ini, dapat dikemukakan pembahasan hasil penelitian yang berasal dari kuesioner, dan kemudian dikombinasikan dengan data observasi dan wawancara terhadap pegawai Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan masyarakat yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Pembahasan dari variable Pengembangan Kelembagaan dapat dilihat dari 9 (Sembilan) dimensi, yaitu Kepemimpinan, Doktrin, Program, Sumber-sumber daya, Struktur Intern, Kaitan yang Memungkinkan, Kaitan Fungsional, Kaitan Normatif, dan Kaitan Tersebar.

Variabel	Dimensi	Indikator	M	Kriteria Penafsiran
Pengembangan Kelembagaan	Kepemimpinan	Manajemen yang intensif (pengelolaan optimal)	4,22	Baik
		Terampil menjalin hubungan	4,35	Sangat Baik
		Tepat dalam pengendalian operasional dan penyelesaian masalah di lapangan	3,90	Baik
	Jumlah	Rekapitulasi Dimensi Kepemimpinan	4,15	Baik
	Doktrin	Spesifikasi nilai-nilai lembaga	3,87	Baik
		Tujuan-tujuan lembaga	4,09	Baik
		Metode-metode operasional	3,80	Baik
		Nilai-nilai, tujuan, dan metode operasional	3,83	Baik
	Jumlah	Rekapitulasi Dimensi Doktrin	3,89	Baik
	Program	Program mencerminkan nilai-nilai dan tujuan	4,19	Baik
		Pelaksanaan program	4,09	Baik
		Alokasi waktu dan biaya	4,12	Baik
		Alokasi sumberdaya manusia	4,09	Baik
	Jumlah	Rekapitulasi Dimensi Program	4,12	Baik
	Sumber-sumber daya	Ketersediaan sumber daya keuangan	3,61	Baik
		Ketersediaan sumber daya manusia	3,35	Cukup Baik
		Ketersediaan sarana penunjang (sarana fisik dan teknologi)	3,64	Baik
	Jumlah	Rekapitulasi Dimensi Sumber-sumber Daya	3,53	Baik
	Struktur Intern	Adanya struktur kepengurusan	3,58	Baik
		Adanya peran dan wewenang (aturan main)	4,03	Baik
		Adanya komunikasi yang baik	3,74	Baik
	Jumlah	Rekapitulasi Dimensi Struktur Intern	3,78	Baik
	Kaitan-kaitan yang Memungkinkan	Terciptanya dukungan dengan organisasi dan kelompok social yang mengendalikan alokasi wewenang dan sumber-sumber daya	3,67	Baik
Kaitan-kaitan Fungsional	Adanya dukungan dari organisasi yang memiliki fungsi yang sama	3,70	Baik	
Kaitan-kaitan Normatif	Mampu bekerjasama dengan lembaga yang memiliki nilai atau normatif	3,77	Baik	
Kaitan-kaitan Tersebar	Adanya dukungan dari kelompok masyarakat yang tidak terorganisasi secara formal	3,51	Baik	
Total Jawaban Responden			80,76	
Rataan			3,84	Baik

Sumber: Hasil Penelitian 2015

Berdasarkan tabel diatas, hasil penghitungan untuk variable pengembangan kelembagaan menunjukkan angka 3,84 dengan demikian berada pada kriteria penilaian Baik. Semua dimensi berada pada kategori baik, mulai dari dimensi kepemimpinan, doktrin, program, sumber daya, struktur intern, kaitan-kaitan yang memungkinkan, kaitan fungsional, kaitan-kaitan normatif, dan kaitan tersebar berada pada kategori baik. Hal ini berarti pengembangan kelembagaan tata kelola hutan taman nasional gunung halimun salak sudah dilakukan dengan baik.

Hambatan Kelembagaan Pengelolaan

Meskipun hasil penghitungan menunjukkan pada kriteria baik, tetapi masih ada hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengembangan kelembagaan TNGHS, menurut hasil observasi dan wawancara antara lain:

Titik kekurangan dari pengembangan kelembagaan yang pertama berada pada faktor sumber-sumber daya yaitu sumber

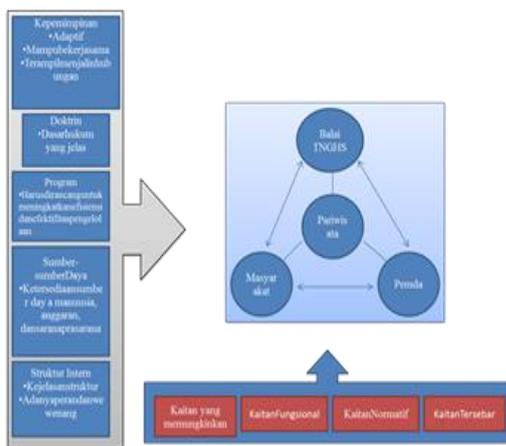
daya manusia, sumberdaya keuangan maupun sarana dan prasarana penunjang sehingga dalam setiap pekerjaan belum efektif terutama dalam kegiatan pengamanan hutan, sehingga sampai saat ini masih terjadi perambahan hutan, illegal logging, pemburuan hewan dan PETI (Penambangan hutan Tanpa Izin), dan masih adanya villa-villa yang berada di kawasan Taman Nasional. Faktor kedua yaitu program, pelaksanaan program yang dilaksanakan kurang maksimal hal tersebut dikarenakan kurangnya pelaksana di lapangan, kurangnya kontrol dari pihak taman nasional. Selanjutnya faktor kaitan tersebar yaitu hubungan dengan sebagian masyarakat kurang baik hal tersebut dikarenakan kurangnya komunikasi dan koordinasi.

Harapan Masyarakat Untuk Kelembagaan TNGHS

Harapan masyarakat adat untuk pengelolaan hutan	Harapan masyarakat nonadat untuk kelembagaan pengelolaan hutan
<ul style="list-style-type: none"> - Kejelasan status hukum MK no 35 tahun 2012, hak ulayat diakui. Untuk pengelolaan hutan ingin dikelola oleh kelembagaan adat. - Ingin diberi kepercayaan penuh dalam pengelolaan hutan. - Ingin segera dibuatkan Perda untuk pengakuan hutan adat. - Adanya batasan yang jelas tentang pengelolaan hutan untuk masyarakat. - Menghargai aturan adat kasepuhan dalam pengelolaan hutan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak taman nasional harus mengerti keinginan dan kebutuhan masyarakat. - Pihak taman nasional harus terus-menerus memberikan pemahaman, melakukan sosialisasi supaya masyarakat memahami betul tentang konservasi. - Ingin diperbolehkan mengambil kayu hanya untuk membangun rumah. - Pengelolaan hutan harus berkelanjutan, dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan taman nasional. Masyarakatpun akan bertanggung jawab untuk penjagaan dan pengamanan hutan walaupun tidak ada petugas taman nasional. - Adanya pelibatan masyarakat disetiap keputusan yang dikeluarkan oleh pihak BTNGHS sebagai lembaga pengelola, harus adanya transparansi. - Penyuluh lapangan ditambah dengan

	<p>syarat harus bermasyarakat, dan tidak gampang tersinggung.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pihak BTNGHS sebagai kelembagaan pengelola taman nasional harus aktif turun ke lapangan, jangan sampai mulus di laporan gagal dilapangan. - Harus ada penggantian mata pencaharian masyarakat seperti peternakan dan perikanan. - Memperpanjang MOU dan HHBK (hasil hutan bukan kayu) dimasukan ke dalam draf MOU dan pariwisata untuk menggantikan penghasilan masyarakat. - Terus melakukan penguatan kelembagaan lokal dalam bentuk penyuluhan-penyuluhan dan pelatihan-pelatihan.
--	--

Desain Kelembagaan Balai TNGHS



Hal yang sudah dijelaskan dalam tabel atau Balai TNGHS bersama masyarakat adat dan pemda bekerjasama membuat aksi kolaborasi membuat program pariwisata. Adapun faktor dari pengembangan kelembagaan yang menjadi dasar keberhasilan yang merujuk pada teorik yang diajukan, bersumber dari pendapat Milton J. Esman adalah sebagai berikut:

1. Kepemimpinan, harus dipimpin dengan gaya kepemimpinan yang adaptif berarti kepemimpinan yang mudah

menyesuaikan diri dengan perubahan. Bergerak cepat dengan berbagai tindakan untuk memecahkan masalah. Dalam pengambilan keputusan harus jelas dan tegas. Mampu bekerjasama dan terampil menjalin hubungan dengan mitra yang bekerjasama. 2. Doktrin, dasar hukum yang jelas akan mampu mendapatkan keputusan yang baik. Dapat diterima dan dipatuhi oleh setiap anggotanya. Mampu memberikan sanksi dan konsekuensinya. 3. Program, program harus dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan dengan perencanaan yang baik. 4. Sumber-sumber daya, pastikan sumber-sumber daya seperti ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan anggaran, dan ketersediaan sarana prasarana memadai. 5. Struktur Intern, tentunya didukung dengan kejelasan struktur, peran dan wewenang sehingga akan dapat memperlancar hubungan dan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan.

Jika kondisi faktor-faktor diatas dapat terpenuhi dengan baik, maka dengan adanya dukungan dari berbagai kaitan yang ada, yaitu kaitan yang memungkinkan, kaitan fungsional, kaitan normatif, dan kaitan tersebar. Maka diharapkan akan muncul berbagai bentuk transaksi yang harmonis diantara semua pihak yang

terkait. Semua pihak akan dapat memainkan perannya dengan baik sesuai yang diharapkan oleh semua pihak.

Capaian dari aksi kolaborasi antara Balai TNGHS, Pemda, dan Masyarakat dalam tersebut adalah 1. Menghindari konflik (konflik antara masyarakat adat dan Balai dapat dikelola dengan baik), 2. Hutan tetap terjaga. 3. Masyarakat mendapatkan penghasilan, 4. Ketergantungan masyarakat terhadap hutan sudah tidak ada, 5. Koordinasi, komunikasi, dan kerjasama antara BTNGHS, Pemda, dan masyarakat adat berjalan baik.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

Setelah peneliti membahas dan menganalisis mengenai hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini peneliti menarik kesimpulan dari hasil analisis pengembangan kelembagaan tata kelola hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak sebagai berikut:

Setelah dilakukan analisis terhadap setiap indikator dari variable pengembangan kelembagaan bahwa skor rata-rata hasil penilaian responden adalah 3,84 yang artinya berada pada klasifikasi penilaian Baik, dengan demikian penilaian terhadap pengembangan kelembagaan tata kelola hutan taman nasional gunung halimun salak sudah dilakukan dengan baik. Dimensi kepemimpinan sebagai dimensi pertama berada pada penilaian baik, begitupun dengan dimensi lainnya seperti dimensi doktrin, program, sumber-sumber daya, struktur intern, kaitan memungkinkan, kaitan fungsional, kaitan normatif dan kaitan tersebar.

Meskipun klasifikasi penilaian terhadap semua dimensi pengembangan kelembagaan berada pada kategori baik, akan tetapi menurut hasil wawancara dengan responden masih ada beberapa dimensi yang harus ditingkatkan lagi dalam pengembangan kelembagaan tata kelola hutan taman nasional gunung halimun salak seperti dimensi sumber-sumber daya,

program, kaitan normatif dan kaitan tersebar.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis dapat mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Pengembangan kelembagaan tata kelola hutan taman nasional gunung halimun salak pada dasarnya sudah dilakukan dengan baik, namun masih ada yang perlu untuk di tingkatkan. Hal yang kiranya harus mendapatkan perhatian yang lebih adalah dimensi sumber-sumber daya, program, kaitan normatif dan kaitan tersebar.

2. Harus adanya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di Balai TNGHS, peningkatan kualitas pegawai bisa dengan cara uji kompetensi dan pembinaan untuk setiap pegawai. Dengan adanya peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia diharapkan dalam pengembangan kelembagaan bisa berjalan dengan baik. Karena sumber daya manusia merupakan unsur yang sangat penting, jika sumber daya manusianya tidak memadai dalam setiap pekerjaanpun tidak akan maksimal. Serta dengan didukungnya sumber dana yang memadai.

3. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang seperti mess pegawai, kantor resort, pondok jaga, sarana pelaksanaan tugas lapangan sudah tidak layak pakai sehingga perlu perbaikan dan atau pergantian seperti alat transportasi, alat komunikasi, dan alat pemadam kebakaran hutan.

4. Meningkatkan pelaksanaan program yang sudah dilakukan oleh TNGHS, pihak Taman Nasional harus lebih aktif lagi turun lapangan untuk melakukan pengawasan setiap pelaksanaan program jangan sampai mulus dilaporkan tapi gagal di lapangan. Terus melakukan sosialisasi, penyuluhan-penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat.

5. Walaupun penilaian angka kriteria untuk dimensi kaitan normatif berada pada kategori baik, tetapi menurut hasil wawancara koordinasi antara Balai dan pemda kurang maksimal. Dengan demikian

harus meningkatkan koordinasi mengenai hutan konservasi dengan pemerintahan setempat, bekerjasama mensosialisasikan tentang hutan konservasi kepada masyarakat.

6. Walaupun penilaian angka kriteria untuk dimensi kaitan tersebar berada pada kategori baik, tetapi menurut hasil wawancara masih ada permasalahan yang berkaitan dengan dimensi kaitan tersebar. Diharapkan pihak Taman Nasional bisa lebih meningkatkan hubungan dengan masyarakat dengan cara membuat jadwal pertemuan rutin, duduk bersama membicarakan jalan keluar tentang permasalahan-permasalahan yang ada, karena dengan adanya pengakuan dan dukungan dari masyarakat pelaksanaan dalam setiap pengelolaan pun akan berjalan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Eaton, Joseph W (1986) *Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Israel, Arturo (1992) *Pengembangan Kelembagaan*, LP3ES, Jakarta
- Maulana, Aris Irawan (2000), *Pengembangan Kelembagaan Gugus Sekolah Dasar di Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur*. FISIP-UNIDA, Bogor
- Nazir, Mohammad (1998) *Metode penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Rahman, Taufik (2000) *Pengembangan Kelembagaan*, Bogor: Fiskal
- RMI The Indonesia Institut For Forestand Environment. (2004) *"Nyoreang Ka Tukang Nyawang Anu Bakal Datang" Penelusuran Pergulatan Kawasan Halimunn, Jawa Barat-Banten*. RMI dan Yayasan Kemala, Bogor
- Santoso, Budi (2007) *Analisis Model "Kampung Konservasi" Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Sekitar Hutan (Studi di Desa Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak*. FISIP-UNIDA, Bogor
- Sugiyono, (2012) *Metode Penelitian*

- Administrasi*, Alfabeta, Bandung
- Sugiyono, (2013) *Metode Penelitian Sosial*, Alfabeta, Bandung
- Harmita, Dini (2009) *Model Kampung Konservasi (MKK)*, BTNGH-S, Sukabumi
- Supriyanto Bambang, Ekariyono Willy (2007) *5 Strategi Rekonstruksi dan sosial Konservasi*, BTNGH-S, Sukabumi
- BTNGH-S, *Rencana Pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun salak Periode 2007-2026*, BTNGH-S, Sukabumi

Sumber Dokumen

1. Undang- Undang No. 41 Tahun 1999
2. Undang-Undang no. 4 tahun 1999
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
4. Undang-Undang Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Nomor 5 tahun 1990
5. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 282/Kpts-II/1992
6. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 175/Kpts-II/2003
7. Data Monografi Desa Cipeteuy Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi 2014

Website

- Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak 2014 <http://halimunsalak.org>
- Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat 2014 www.dishut.jabarprov.go.id